



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Januari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ROSLIANI
2. Jabatan : WAKIL KETUA
3. NHK : 6361

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 1.340.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000
3. Tanah Seluas 150 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
4. Tanah Seluas 826 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG , HIBAH DENGAN AKTA Rp. 750.000.000
5. Tanah Seluas 150 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 234.000.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
3. MOBIL, KIJANG INNOVA MINIBUS Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 225.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 101.650.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 373.683.817

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 2.049.333.817



III. HUTANG

Rp. ---

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

2.049.333.817

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.